

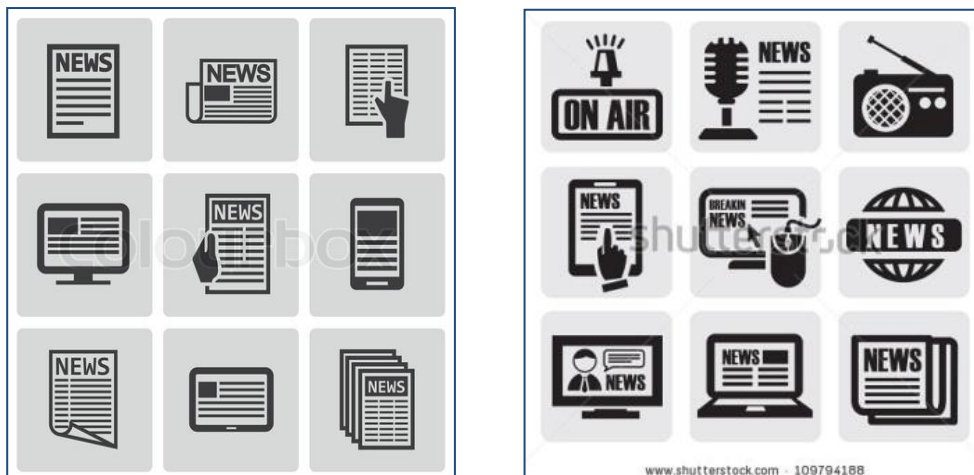


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

**Ekonomi**

**Rabu, 13 Maret 2019**



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2019**

## **Daftar Isi**

1. KOLABORASI UNTUK WUJUDKAN AGENDA 2030 (*Media Online Kompas*)
2. PRESIDEN: KAWAL INVESTASI (*Media Online Kompas*)
3. PACU SERTIFIKASI TENAGA KERJA (*Media Online Kompas*)
4. PEMDA DIMINTA PERMUDAH INVESTASI (*Media Online Republika*)
5. (*Media Online Republika*)

# Kolaborasi untuk Wujudkan Agenda 2030

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan global ditargetkan tercapai pada 2030. Tujuannya secara umum adalah mewujudkan kesejahteraan dunia, termasuk Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung agenda besar ini.

SDGs diterbitkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB memiliki 17 tujuan, 167 target, dan 244 indikator terukur. Tujuan-tujuan itu adalah tanpa kekerasan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; perdamaian, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkeadilan; ekosistem laut; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan yang tangguh; serta kemiskinan yang mencapai tujuan.

Tujuan-tujuan ini dikolompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Klasifikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan, meski dalam pelaksanaannya tetap saling terkait.

SDGs menawarkan konsep keberlanjutan yang sudah mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Konsepnya tidak ada pertentangan ekonomi yang akan berkelanjutan kalau tidak ada perlindungan lingkungan hidup dan tidak ada dukungan dari sosial atau masyarakat. Sebaliknya, tidak ada upaya menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan kalau tidak ada kegiatan ekonomi yang cukup maupun tidak memperhatikan masyarakat. Adanya keterkaitan ini membuat SDGs menurut saya sangat tepat untuk Indonesia, yang memang punya tingkat kompleksitas sendiri, ujar Bambang ketika ditemui di kantornya, Selasa (19/2/2019).

Dalam pelaksanaan TPB, Indonesia mengadopsi pembangunan yang universal, terintegrasi, dan tidak ada siapa yang tertinggal (*no one left behind*). Indonesia berupaya mengartikulasikan konsep TPB yang ideal, yaitu menjadikan TPB bagian utama dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, TPB tidak terpisahkan dari agenda nasional.

Pemerintah pun telah menyusun berbagai instrumen untuk mengawal rencana-rencana TPB. Target-target TPB diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan akan diturunkan ke RPJMN 2020-2024.

Presiden Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perpres ini sekaligus menorkan mandat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksanaan TPB di Indonesia.

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB juga telah dirampungkan dan sebagian provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang dapat menjadi pegangan pelaksanaan SDGs. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas kini sedang menyusun Peta Jalan (Road Map) TPB yang ditargetkan selesai tahun ini. Peta Jalan TPB bermanfaat sebagai acuan target pembangunan Indonesia sampai 2030 nanti, yang akan dijabarkan dalam dokumen RPJMN selama periode pelaksanaan TPB.

### Dorongan SDGs Center

Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan adalah kunci pelaksanaan TPB. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, filantropi, serta organisasi-organisasi masyarakat perlu saling bekerja sama dan mengisi peran untuk tujuan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini telah ada 108 organisasi nonpemerintah yang mencantumkan Rencana Kerja SDGs di dalam RAN 2017-2019, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Kalangan filantropi dan bisnis yang terdiri atas 15 asosiasi telah membentuk Forum Komunitas dan Bisnis Indonesia untuk SDGs (FBISDGI). Pihak swasta juga telah mengadopsikan SDGs dalam kegiatannya. Perusahaan Astra misalnya, mengembangkan energi terbarukan, bermitra dengan petani lokal, dan melakukan efisiensi energi.

Keterlibatan akademisi dan universitas juga vital. Peran penting dari universitas dalam TPB antara lain menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya, mengorganisasikan SDGs dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lain dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TPB, serta membantu menyusun RAD TPB.

Konferensi Tahunan SDGs Desember tahun lalu, Menteri PPN juga menebalkan pemerintah kedepannya akan terus mendorong SDGs Center di



BAMBANG BRODJONEGORO, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

berbagai perguruan tinggi. Kontribusi SDGs Center ini dikaitkan langsung dengan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal pendidikan, peran SDGs Center antara lain pendidik untuk tujuan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan mobilisasi generasi muda. Fada darma yang berhubungan dengan penelitian, SDGs Center dapat menjadi wadah yang kompeten untuk penelitian terkait SDGs, baik yang interdisipliner maupun transdisipliner; serta riset untuk menghasilkan inovasi dan solusi terkait masalah tersebut.

"Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, kita harapkan SDGs Center di universitas paling tidak membantu pemerintah setempat untuk bisa menerjemahkan SDGs ke dalam kegiatan secara lokal sebagai nantinya SDGs menjadi *mainstream* di semua RPJMP. Tentunya, harus ada yang mengawal dan membimbing kami harapan SDGs Center ini dapat menjadi perwujudan dengan tujuan berorientasi lebih dalam dengan pemerintah daerah," ujar Bambang.

Saat ini, SDGs Center sudah terbentuk di beberapa universitas, seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Bergkila, Universitas Jember, Universitas Mataram, IPB, ITB, dan Universitas Hasanudin. Melalui peran, kontribusi, dan kolaborasi SDGs Center dengan mitra, maupun kementerian lembaga penelitian, diharapkan sumber tinggi dapat memperkuat proses pengorganisasian, kebijakan dan melakukan advokasi dalam pelaksanaan TPB.

"SDGs Center meyakini menjadi suatu wadah yang sergi dibentuk universitas untuk bisa menciptakan keterkaitan ilmu. Setiap kali mempromosikan SDGs Center, saya selalu bilang, ini kesempatan emas bagi universitas untuk menyalakan ego-ego fakultas atau jurusan ke dalam satu tujuan, yaitu SDGs," tambah Bambang.

### Inovasi pembiayaan

Pelaksanaan rencana-rencana SDGs membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Mengutip opini berjudul "Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan" yang ditulis Menteri PPN di koran ini (20 Desember 2018), UNCTAD (2014) memperkirakan kebutuhan pembiayaan oleh semua negara di dunia untuk mencapai target-target SDGs adalah 3,8 triliun dolar AS per tahun. Namun, pembiayaan yang tersedia rata-rata setiap tahun untuk pembangunan saat ini adalah 1,4 triliun dolar AS, sehingga ada kesenjangan pembiayaan 2,5 triliun dolar AS per tahun.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber lain dan cara-cara baru untuk mendukung pencapaian pelaksanaan TPB. Ini dapat diisi dengan kontribusi swasta dan masyarakat.

"Cara pembiayaan yang sekarang sedang menjadi pembicaraan secara global adalah *blended finance*. Jadi, pembiayaan ini sifatnya campuran, bisa *multiple sources* dan *multiple instruments*," tutur Menteri PPN.

*Multiple sources* berarti sumbernya bisa dari berbagai pihak. Sementara *multiple instruments* menggunakan berbagai instrumen, seperti hibah,

investasi, atau pinjaman. Lewat cara ini, kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembiayaan SDGs juga semakin besar.

Konsep *blended financing* kami yakin akan menjadi isu utama dalam pembiayaan SDGs ke depan sampai 2030. Konsep ini termasuk baru dan tentunya kita harus beruntung karena dengan adanya SDGs, kita tahu bahwa masyarakat juga ternyata memiliki keinginan sangat besar untuk ikut terlibat menangani masalah pembangunan karena mereka merasa itu permasalahan mereka juga," kata Bambang.

Terkait pembiayaan ini, Bappenas juga berperan sebagai SDGs Financing Hub. Tugasnya, menyinkronkan pembiayaan TPB oleh para pihak, kemudian mengartikulasikan sumber dan instrumen-instrumen pembiayaan ini ke kegiatan yang terkait langsung dengan tujuan-tujuan dalam TPB.

SDGs Financing Hub juga terhubung dengan Innovative Financing Lab yang diinisiasi United Nations Development Program (UNDP). Innovative Financing Lab akan lebih difokuskan untuk mengembangkan dan menemukan model-model pembiayaan baru nonkonvensional melalui pendekatan uji coba yang dilakukan bersama-sama dengan para pihak yang terlibat.

"Kami ucapkan apresiasi Innovative Financing Lab bisa membantu Bappenas, terutama sebagai SDGs Financing Hub, untuk bisa memberi pembangunan kita kita instrumen apa yang paling cocok jika ingin menggalang dana terkait itu tersebut. Kami harapkan inovasi dalam pembiayaan ini bisa muncul melalui Innovative Financing Lab," ujar Bambang.

Innovative Financing Lab telah menghasilkan beberapa inisiatif yang efektif dan mampu menjangkau keseluruhan masyarakat secara lebih luas. Contohnya, UNDP mengombinasikan zakat dan dana CSR dari Bank Jambal untuk mengembangkan fasilitas Pembiangkit Literasi Tenaga Mikro Hiliris (PLITH) pada dua kabupaten di Provinsi Jambi. PLITH ini akan menyediakan energi bersih dan terjangkau untuk lebih dari 8.000 penduduk. Ini juga membantu mereka memiliki upah yang berkelanjutan.

Berikut inovasi lain misalnya penandatangan kerja sama antara UNDP dan Kabupaten Muhi Banyuwani untuk mengembangkan dana abadi (*evergreen endow fund*) dan mempromosikan biayanya dari industri kreatif untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan. Dua hal tersebut hanyalah sedikit contoh dari bagaimana Innovative Financing Lab dan Bappenas sebagai Financing Hub bekerja untuk mencari model pembiayaan paling cocok untuk TPB.

### Pentingnya kontinuitas

Bappenas sedang menyusun peta jalan menuju target tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada 2030. Dibutuhkan langkah-langkah strategi dan tahapan-tahapan untuk mewujudkan hal itu, termasuk prioritas-prioritas jangka pendek.

"Road map sampai sekarang masih dalam penyelesaian. Tetapi bayangan saya begini, mungkin boleh saya katakan *goal* untuk penurunan kesenjangan, yaitu *goal* nomor 10, menjadi tujuan akhirnya. Karena saling berkaitan satu sama lain, kita ingin *goal* dalam SDGs itu hasil akhirnya adalah pemerataan yang lebih baik. Untuk mencapai pemerataan yang lebih baik, tentunya harus didukung dengan, misalnya upaya untuk menuntaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan hidup. Jadi, kalau dalam jangka pendek seperti ini, jangka panjangnya, tentu kita berharap SDGs 2030 bisa kita capai untuk yang mendukung," ujar Menteri PPN.

Menurut Bambang, tantangan utama pencapaian SDGs adalah kontinuitas pelaksanaan pembangunan. Dengan sistem demokrasi, masa pemerintahan adalah 5 tahun, paling lama 10 tahun. Padahal, target SDGs adalah modal pendek, tinggal 11 tahun. Secara praktis, waktu Indonesia tinggal 2 pemerintahan. Dalam satu waktu ini, tidak boleh lagi ada semangat jadi menghambat kita mendekati SDGs.

"Yang paling penting adalah keyakinan pemimpin-pemimpin berikutnya, supaya mereka melihat ujungnya adalah pada pencapaian SDGsnya dan fokus pada bagaimana mencapainya. *Roadmap* menjadi sangat urgen karena SDGs tidak bisa dilakukan tanpa kontinuitas. Dan, jangan lupa 'S' di situ adalah *antunantun*, jadi, tanpa ada keberlanjutan, sulit mencapai tujuan pembangunan yang ideal," tutur Kepala Bappenas ini.

Peta Jalan TPB dirumuskan sejak tahun ini. Itu akan menjadi panduan untuk RPJMN berikutnya, serta seluruh langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. [NOW/YS]

Peran penting dan strategis dalam mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Kemudian Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengangkat dan memasyarakatkan TPB. Komitmen tertinggi ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres No 59/2017 yang memandatkan empat hal penting: (1) tata kelola yang inklusif, (2) penyusunan rencana aksi, (3) pelaporan keberhasilan, dan (4) pembiayaan TPB, yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal (provinsi dan kabupaten/kota).

Hashtag Berita :

- #KesejahteraanMasyarakat
- #PertumbuhanEkonomiNasional
- #KementerianPPN/Bappenas
- #PelaksanaanProgramNasional
- #PembangunanBerkelanjutan
- #ProdukDomestikBruto
- #RPJMN
- #RKP
- #StabilitasEkonomiIndonesia

# KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

13 Maret 2019

## Presiden: Kawal Investasi

Investor yang berminat berinvestasi di Indonesia cukup banyak. Namun, realisasi penanaman modal asing pada 2018 turun dibandingkan dengan 2017. Penyebabnya mesti dicari dan dituntaskan.

**TANGERANG, KOMPAS** — Posisi Indonesia tertinggal dari beberapa negara tetangga dalam hal investasi dan ekspor. Karena itu, proses investasi mesti dikawal sebaik-baiknya agar minat calon investor untuk menanamkan modal di Tanah Air benar-benar terealisasi.

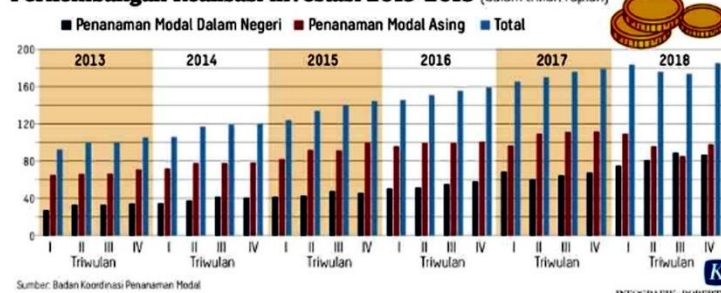
Indonesia, yang memiliki kekuatan besar dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia, jangan sampai tertinggal dari Kamboja dan Laos. Saat ini, kinerja ekspor dan investasi Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

"Perlu saya sampaikan, yang namanya investasi dan ekspor kita itu sudah ditinggal tetangga-tetangga," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019).

Presiden meminta gubernur, bupati, dan wali kota mengencangkan hilirisasi industri. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah atau bahan yang minim diolah, seperti karet, minyak sawit mentah, kopra, dan batubara.

"Waktu ledakan harga komoditas global semua senang

**Perkembangan Realisasi Investasi 2013-2018** (dalam triliun rupiah)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal



INFOGRAFIC: BOHIBITUS

di Indonesia turun dari tahun sebelumnya.

"Tahun lalu, PMA turun 8,8 persen, padahal biasanya tumbuh dua angka. Kalau pakai formula FDI (*foreign direct investment*) lebih parah lagi, yakni minus 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Thomas.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi PMA 2018 sebesar Rp 392,7 triliun atau turun 8,8 persen secara tahunan. Menurut Thomas, kondisi itu konsisten dengan perkembangan di seluruh dunia.

Setidaknya ada tiga guncangan yang menghantam kecenderungan investasi di seluruh dunia pada 2018. Pertama, perang dagang Amerika Serikat dan China. Kedua, bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan empat kali dalam setahun. "Ketiga, yang banyak orang kurang dalam, sebetulnya pada 2017 pemerintahan Presiden Trump mengadakan pengampunan pajak besar-besaran," ujarnya. Kondisi itu mengakibatkan modal ke AS pada 2018 dalam jumlah besar.

Thomas mengatakan, semangat BKPM tahun ini mendorong kesiapan pemulihan investasi di seluruh dunia.

(CAS/LAS)

Tapi, lupa mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Ini kesalahan yang harus kita perbaiki," kata Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta agar investasi terkait industri untuk mengolah bahan mentah, berorientasi ekspor, dan substitusi impor diprioritaskan. "Enggak usah bertele-tele. Tutup mata. Segera beri izin. Tapi, yang paling penting, memang, bukan tutup matanya saja. Tetapi, harus dikawal. Kelemahan kita ada di sini," kata Presiden.

Tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor's, Moody's, dan Fitch, sudah menempatkan Indonesia

dalam posisi layak investasi. Hal itu, menurut Presiden, mesti bisa dimanfaatkan.

Pemanfaatan serupa bisa dilakukan terkait hasil survei Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) kepada para CEO perusahaan multinasional. Hasil survei menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 negara tujuan investasi prospektif.

"Yang saya rasakan sehari-hari, investor berbondong-bondong ke kita ingin berinvestasi ini itu. Tapi, kok, enggak menetas, enggak terealisasi. Ini salahnya di mana?

Di pusat, provinsi, atau kabupaten? Ada yang salah ini dan harus dicek," kata Presiden.

Kesalahan mungkin terjadi di sisi kecepatan perizinan, pembebasan lahan, atau pelayanan yang tidak baik. "Ini persoalan besar karena kunci pertumbuhan ekonomi itu dua, yaitu investasi dan ekspor," ujar Presiden Jokowi.

### Guncangan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menuturkan, pada 2018, untuk pertama kali dalam empat tahun terakhir, penanaman modal asing (PMA)

Presiden Joko Widodo heran dengan nilai investasi di Indonesia yang tak kunjung meningkat. Nilai investasi Indonesia yang kalah dari negara-negara tetangga. "Yang namanya investasi dan ekspor kita sudah ditinggal, kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? Ya kalah, Thailand? Ya kalah, Filipina? Ya kalah, Vietnam? Ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos. Kemudian Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin daerah mempermudah proses perizinan usaha dan investasi di daerah. Pasalnya, selama ini, banyak investor yang berminat masuk ke Indonesia, namun hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah investasi yang benar-benar terealisasi.

Hashtag Berita :

#PertumbuhanEkonomiNasional #KesejahteraanMasyarakat #BKPM #PMA #PMDN  
 #StabilitasEkonomiIndonesia #RPJMN #PelaksanaanProgramNasional #Investasi  
 #ProdukDomestikBruto #RKP

# KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

13 Maret 2019

## Pacu Sertifikasi Tenaga Kerja

Tenaga konstruksi bersertifikat dinilai masih sangat minim. Pemerintah percepat sertifikasi untuk topang pembangunan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pembangunan infrastruktur yang masif memerlukan dukungan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. Sayangnya, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat baru 7,4 persen atau sekitar 616.000 orang dari total tenaga kerja konstruksi.

Sertifikat menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), tenaga kerja konstruksi saat ini mencapai 8,3 juta orang.

"Dengan begitu banyaknya pekerjaan infrastruktur yang sudah dan akan kita kerjakan, kehadiran saudara semua sangat dibutuhkan sekali," kata Presiden Joko Widodo di depan sekitar 6.000 tenaga kerja konstruksi pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja Konstruksi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 2019, dari 616.000 orang yang

telah tersertifikasi, 419.000 orang di antaranya tersertifikasi sebagai tenaga kerja terampil dan 197.000 orang tenaga kerja ahli. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi mencapai 192.000 tenaga kerja atau rata-rata 50.000 tenaga kerja per tahun.

Menurut Presiden, tenaga kerja konstruksi sangat dibutuhkan, di antaranya untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, pulau-pulau terpencil, dan di daerah terisolasi lain. Melalui sertifikasi, kompetensi tenaga kerja dapat ditingkatkan, terlebih saat ini teknologi berkembang dengan cepat.

### Jamin mutu

Presiden minta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar program sertifikasi tenaga konstruksi diperbanyak untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pekerjaan konstruksi.

Tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan sertifikasi 212.000 tenaga kerja konstruksi melalui program pelatihan dan sertifikasi reguler. Kementerian PUPR juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor untuk menyertifikasi 300.000 tenaga kerja. Dengan demikian, pada akhir tahun diharapkan ada 512.000 tenaga kerja konstruksi tersertifikasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikat diberikan setelah peserta diuji kompetensinya. Tidak hanya pengakuan kemampuan, sertifikat juga meningkatkan pendapatan.

Sertifikasi merupakan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi yang diundangkan tahun 2017. Dua tahun ini pemerintah berupaya memperbaiki administrasi dan mekanisme jasa konstruksi, termasuk mewajibkan penyedia jasa konstruksi mempekerjakan tenaga bersertifikat. (NAD/LAS)

**Pembangunan infrastruktur yang besar memerlukan dukungan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. Sertifikat di bidang konstruksi menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja sekaligus berfungsi meningkatkan penghasilan. Terlebih, saat ini teknologi, termasuk di bidang konstruksi, berkembang dengan cepat. Presiden berharap, tenaga kerja di bidang konstruksi agar terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan negara lain.**

Hashtag Berita :

#KesempatanKerja #PertumbuhanEkonomiNasional #KesejahteraanMasyarakat  
#PelaksanaanProgramNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #Infrastruktur #PMA #PMDN  
#RPJMN #RKP #KetenagaKerjaan

# REPUBLIKA

RABU, 13 MARET 2019

## Pemda Diminta Permudah Investasi

● SAPTO ANDIKA CANDRA  
ANDINDA PRYANKA

Presiden berencana menunjuk menteri khusus investasi dan ekspor.

TANGERANG SELATAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah membuka jalan bagi investor yang ingin membangun industri. Menurut Jokowi, masih ada persoalan dalam tata kelola perizinan investasi di Tanah Air. Hal itu, kemudian membuat realisasi nilai investasi pada tahun lalu jeblok.

"Bupati, wali kota, kalau ada investor industri apa pun, tutup mata, beri izin. Yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah. Beri izin. Namun, juga kawal, tunjukkan. Kalau mau beli lahan tunjukkan lahannya di mana," kata Jokowi ketika memberikan sambutan Rakernas Investasi 2019 di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3).

Jokowi meminta pemda bisa menggelar karpet merah bagi investor, terutama yang ingin membangun industri hilirisasi komoditas unggulan Indonesia. Misalnya, pendirian pabrik ban atau sarung tangan di Sumatra Selatan yang memproduksi karet atau pendirian pabrik pengolahan sawit di Sumatra Barat.

Badan Koordinasi Pena-

naman Modal (BKPM) mencatat, total realisasi penanaman modal asing (PMA) 2018 sebesar Rp 392,7 triliun. Angka ini turun 8,8 persen dibandingkan realisasi investasi PMA 2017 sebesar Rp 430,5 triliun. Kinerja perdagangan internasional Indonesia pada tahun lalu juga mencatat hal negatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar 8,57 miliar dolar AS. Defisit tersebut adalah yang terbesar sejak 1975. Menurut Jokowi, anjloknya investasi dan ekspor pada tahun lalu menjadi ganjalan besar pada pertumbuhan ekonomi.

"Kita sudah terlalu lama, ekspor bahan mentah, *raw material*. Sudah berpuluh-puluh tahun kita belum masuk hilirisasi dan industrialisasi," kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemda bisa segera mengintegrasikan seluruh proses perizinan berusaha dalam sistem *online single submission* (OSS). Dia pun mengingatkan pemda yang ingin membuat terobosan dalam kemudahan perizinan untuk tidak membangun sistem sendiri. Salah satu daerah yang disebut adalah DKI Jakarta.

Darmin mengatakan, Jakarta dan Surabaya adalah dua kota yang dijadikan lokasi survei Bank Dunia dalam laporan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB).

Menurut Darmin, hal itu ber-

potensi memunculkan tumpang-tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikaasih Lembong optimistis, PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun ini dapat tumbuh dua digit. Thomas mengatakan, hal itu dapat terwujud seiring dengan perbaikan sistem perizinan yang terkoneksi melalui Koordinasi Pengawasan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap).

Menurut Thomas, aplikasi tersebut akan membantu pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan investasi hingga di tingkat pemda.

### Jabatan baru

Untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor, Jokowi berencana menunjuk dua menteri khusus.

"Saya sudah sampaikan sepekan lalu dalam rapat kabinet apakah perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Wong, penyakit kita ada di situ," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, keberadaan menteri tersebut sudah lumrah di negara lain. Selain menteri yang sudah ada saat ini, kata dia, perlu ada dua jabatan setara menteri yang punya tugas khusus mengurus persoalan investasi dan ekspor. Harapannya, dua sektor ini bisa dijenjot untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

■ ed: ahmad fikri noor

## PEMDA DIMINTA PERMUDAH INVESTASI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah membuka jalan bagi investor yang ingin membangun industri. Menurut Jokowi, masih ada persoalan dalam tata kelola perizinan investasi di Tanah Air. Hal itu, kemudian membuat realisasi nilai investasi pada tahun lalu jeblok. Selain itu, pemerintah meminta pemda bisa menggelar karpet merah bagi investor, terutama yang ingin membangun industri hilirisasi komoditas unggulan Indonesia.

Hashtag Berita :

#PMA #PMDN #RPJMN #RKP  
#BKPM #EksporImpor #Investasi  
#PertumbuhanEkonomiNasional  
#PelaksanaanProgramNasional  
#StabilitasEkonomiIndonesia  
#KesejahteraanMasyarakat

# REPUBLIKA

RABU, 13 MARET 2019

## Cukai Dinilai Lebih Tepat

● INTAN PRATIWI,

**Basis pengenaan PPnBM adalah harga barang, bukan tingkat emisi.**

JAKARTA — Dukungan untuk mempercepat pengembangan industri mobil listrik dinilai lebih pas menggunakan cukai, bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Sebab, ada aspek pengendalian konsumsi bila pemerintah juga mengejar efek terhadap lingkungan.

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai, bukan PPnBM seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi, dalam praktiknya, beberapa alternatif skema insentif tetap memiliki kelebihan dan kekurangan serta disesuaikan dengan konteks tiap negara.

Yustinus memaparkan, pada prinsipnya, ide memberikan insentif terhadap setiap upaya pengurangan emisi karbon telah menjadi tren glo-

bal dan dipraktikkan banyak negara maju. Itu sejalan dengan upaya menjaga lingkungan hidup, mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan menciptakan lingkungan yang berdaya lanjut bagi ekosistem.

"Idealnya, dengan mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Karakteristik objek cukai, antara lain, konsumsinya harus dibatasi atau dikendalikan karena memiliki dampak negatif," ujar Yustinus saat dihubungi *Republika*, Selasa (12/3).

Sementara, untuk skema PPnBM, Yustinus mengatakan, instrumen tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN. PPnBM bertujuan untuk mengatur konsumsi atas barang yang bersifat mewah demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, pelanggaran PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan dapat berpotensi tidak sesuai dengan karakteristik skema PPnBM. Misalnya, terhadap kendaraan yang harganya mahal, tapi berteknologi tinggi dan rendah emisi.

Satu-satunya klausul yang dapat digunakan untuk kendaraan model itu adalah nilai guna bagi masyarakat. "Artinya, semakin tinggi nilai guna maka PPnBM semakin rendah, dan sebaliknya," ujar Yustinus.

Kesulitan lain, yakni di hal ad-

ministrasi. Tingkat emisi yang berbeda-beda akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Pada tahap itu PPnBM punya keterbatasan karena basis pengenaannya adalah harga barang kendaraan, bukan tingkat emisi.

Sebaliknya, lanjut dia, cukai dapat dikenakan secara periodik, sekurangnya saat kewajiban menguji emisi dilakukan. Hal itu lebih menjamin pencapaian tujuan mengendalikan lingkungan.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugarto menilai, pemakaian acuan tingkat emisi memang lebih baik. Makin kecil emisi dan pemakaian BBM, makin kecil pajaknya.

Pemerintah mengusulkan revisi pengenaan PPnBM antara nol hingga 70 persen berdasarkan kriteria yang lebih detail, termasuk tingkat emisi dan kapasitas penumpang, bukan lagi sekadar sedan dan nonsedan serta kapasitas bahan bakar.

Kepada Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, insentif berupa PPnBM nol persen juga dimaksudkan untuk mengembangkan industri mobil listrik Tanah Air. Hal ini guna mengimbangi biaya produksi mobil listrik yang cukup mahal.

"Perubahan skema ini hanya me-

nguntungkan bagi mobil listrik saja. Untuk mobil supermewah tetap dikenakan PPnBM sebesar 125 persen," kata Sri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).

Adapun mobil supermewah merupakan mobil dengan kapasitas mesin di atas 5.000 cc, semisal, Lamborghini. Dalam aturan sebelumnya, pengelompokan pengenaan PPnBM bervariasi dari 10 hingga 125 persen untuk kapasitas mesin 5.000 cc.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menilai, skema perubahan PPnBM akan memacu industri otomotif nasional bertumbuh. Sebab, selama ini, industri mengeluhkan mahalnya harga bahan baku mobil listrik.

"Kami tidak mau subsidi BBM diganti dengan subsidi kendaraan. Makanya, kami mengambil langkah insentif fiskal untuk mendorong industri mobil listrik tumbuh," kata Airlangga.

Pemerintah menetapkan target sebanyak 20 persen mobil Indonesia pada 2025 adalah mobil listrik dengan berbagai teknologi. Saat ini, pemerintah tengah menggodok peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) tentang percepatan pembangunan industri otomotif.

■ Imas damayanti ed: Ijui pratiwi

**Percepatan pengembangan industri mobil listrik dinilai lebih pas menggunakan cukai, bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBW). Sebab, ada aspek pengendalian konsumsi bila pemerintah juga mengejar efek terhadap lingkungan. Sementara, untuk skema PPnBW yaitu instrumen tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN. PPnBW bertujuan untuk mengatur konsumsiasat barang yang bersifat mewah demi memenuhi rasa keadilan masyarakat**

Hashtag Berita :

#PertumbuhanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #Industri #Perpajakan #PMA #PelaksanaanProgramNasional #PMDN #RPJMN #RKP #BKPM #DuniaUsaha #Investasi